

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Akuntan Publik merupakan suatu badan usaha Akuntan Publik yang bergerak dibidang jasa. Sedangkan, Akuntan Publik adalah seorang akuntan yang telah mendapatkan izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasanya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008. Terdapat dua bidang jasa dalam Kantor Akuntan Publik meliputi:

1. Jasa asestasi, yang didalamnya adalah audit umum atas laporan keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, pemeriksaan pelaporan informasi keuangan proforma, dan review laporan keuangan.
2. Jasa non asestasi, jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan dan konsultasi.

Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan paling lama untuk lima tahun buku berturut-turut, sedangkan seorang akuntan publik hanya dapat melakukan paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut. Dalam menjalankan profesinya, Akuntan Publik diatur oleh kode etik profesi. Selain itu, dalam standar umum auditing auditor diwajibkan menggunakan kemampuan profesionalnya dengan cermat dan teliti dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya.

Laporan keuangan dibutuhkan oleh pihak internal dan eksternal perusahaan dalam mengambil keputusan, oleh karena itu dibutuhkan pihak yang independen untuk memberikan dan meningkatkan kepercayaan kepada para penggunanya. KAP bertanggungjawab dalam memberikan pernyataan kewajaran bahwa laporan keuangan yang disajikan telah benar dan dapat dijadikan pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan maupun manajemen.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil objek penelitian Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung karena Kantor Akuntan Publik di Bandung memiliki

jumlah Kantor Akuntan Publik terbanyak ketiga di Indonesia setelah Jakarta (286 KAP) dan Surabaya (46 KAP). Terdapat 35 KAP yang aktif di wilayah Bandung sesuai data IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) tahun 2019. Namun, yang dijadikan sampel pada penelitian ini hanya KAP yang mengembalikan kuesioner yang telah didistribusikan kepada masing-masing KAP. Berikut ini perincian KAP yang ada di Bandung.

Tabel 1.1 Daftar KAP di Bandung

No.	Tipe	Nama Kantor Akuntan Publik
1.	Pusat	KAP ABDUL RASYID
2.	Pusat	KAP AF. RACHMAN & SOETJIPTO WS
3.	Pusat	KAP Dr. AGUS WIDARSONO
4.	Cabang	KAP ASEP RAHMANSYAH MANSUR & SUHARYONO
5.	Pusat	KAP CHRIS, HERMAWAN
6.	Pusat	KAP Drs. DJAELANI HEDRAKUSUMAH
7.	Pusat	KAP DERDJO DJONY SAPUTRO
8.	Pusat	KAP DJOEMARMA, WAHYUDIN & REKAN
9.	Cabang	KAP DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI
10.	Cabang	KAP GATOT PERMADI, AZWIR & ABIMAIL
11.	Pusat	KAP Dr. H.E.R SUHARDJADINATA & REKAN
12.	Pusat	KAP HARTMAN
13.	Cabang	KAP HELIANTONO & REKAN
14.	Pusat	KAP JAHJA GUNAWAN
15.	Cabang	KAP JOJO SUNARJO & REKAN
16.	Pusat	KAP Drs. JOSEPH MUNTHE
17.	Pusat	KAP DRS KAREL & WIDYARTA

(Bersambung)

(Sambungan)

No.	Tipe	Nama Kantor Akuntan Publik
18.	Pusat	KAP KOESBANDIJAH, BEDDY SAMSI & SETIASIH
19.	Cabang	KAP KUMALAHADI, KUNCARA, SUGENG PAMUDJI DAN REKAN
20.	Pusat	KAP Drs. LA MIDJAN & REKAN
21.	Pusat	KAP LYDIA & LIM
22.	Pusat	KAP MOCH. ZAINUDDIN, SUKMADI & REKAN
23.	Pusat	KAP Dr. MOH. MANSUR
24.	Pusat	KAP MOH. WILDAN
25.	Pusat	KAP NANO SUYATNA
26.	Pusat	KAP PEDDY HF. DASUKI
27.	Pusat	KAP Drs. R. HIDAYAT EFFENDY
28.	Pusat	KAP ROEBIANDINI & REKAN
29.	Pusat	KAP Drs. RONALD HARYANTO
30.	Pusat	KAP SABAR & REKAN
31.	Pusat	KAP Drs. SANUSI DAN REKAN
32.	Pusat	KAP SUGIONO POULUS
33.	Pusat	KAP Prof. Dr. H. TB HASANUDDIN, MSc & REKAN
34.	Cabang	KAP TANUBRATA, SUSANTO, FAHMI, BAMBANG DAN REKAN
35.	Pusat	KAP Dra. YATI RUHIYATI

Sumber: <http://iapi.or.id> (2019)

1.2 Latar Belakang Penelitian

Seiring berkembangnya perusahaan, fungsi audit semakin penting dan muncul kebutuhan berdasarkan pemerintah, pemegang saham, analisis keuangan, investor dan masyarakat untuk menilai kualitas manajemen menurut output operasi dan prestasi para manajer. Untuk mengatasi kebutuhan tersebut, muncul audit manajemen menjadi sarana yang terpercaya dalam membantu pelaksanaan tanggungjawab mereka memberikan analisis, penilaian, rekomendasi terhadap

kegiatan yang telah dilakukan. Audit dikatakan andal apabila dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut dan mengetahui apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji secara material.

Auditor harus mempertimbangkan risiko audit dan materialitas untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup dan sebagai dasar memadai untuk mengevaluasi laporan keuangan. Sebagai akibat interaksi antara pertimbangan kuantitatif dan kualitatif dalam mempertimbangkan materialitas, salah saji yang jumlahnya relatif kecil yang ditemukan oleh auditor dapat berdampak material terhadap laporan keuangan. Auditor juga harus mempertimbangkan dengan baik penaksiran materialitas pada tahap perencanaan audit. Jika auditor menentukan jumlah rupiah materialitas terlalu rendah, auditor akan mengkonsumsi waktu dan usaha yang sebenarnya tidak diperlukan. Sebaliknya, jika auditor menentukan jumlah rupiah materialitas terlalu tinggi, auditor akan mengabaikan salah saji yang signifikan sehingga ia memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material.

Ada beberapa kasus yang terjadi mengenai tingkat materialitas yaitu kasus Garuda. Laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) pada 2018 sedang menjadi sorotan. Dua komisaris PT Garuda Indonesia Tbk tidak setuju dengan pencatatan laporan keuangan Garuda Indonesia pada 2018. Hal ini terkait perjanjian kerja sama penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan antara PT Mahata Aero Teknologi dan PT Citilink Indonesia pada 31 Oktober 2018. Dari kerja sama itu, perseroan akan mendapatkan pendapatan dari Mahata Aero Teknologi sebesar USD 239.940.000. Di antaranya sebesar USD 28.000.000 merupakan bagian hasil perseroan yang didapat dari PT Sriwijaya Air. Namun, hal itu dinilai tidak dapat diakui dalam tahun buku 2018. Perjanjian Mahata ditandatangani 31 Oktober 2018, tapi hingga tahun buku 2018 berakhir, bahkan hingga surat ini dibuat, tidak ada satu pembayaran pun yang telah dilakukan oleh

pihak Mahata meski pun telah terpasang satu unit alat di Citilink. Komisaris menilai kalau pengakuan pendapatan dari perjanjian Mahata oleh perseroan sebesar USD 239.940.000 merupakan jumlah signifikan. Apabila tanpa pengakuan pendapatan ini perseroan akan alami kerugian sebesar USD 244.958.308. Dampak dari pengakuan pendapatan tersebut, laporan keuangan perseroan tahun buku 2018 menimbulkan “misleading” atau menyesatkan yang material dampaknya dari sebelumnya membukukan kerugian yang signifikan menjadi laba, terlebih perseroan adalah perusahaan publik atau terbuka. Laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk per 31 Desember 2018 diaudit oleh kantor akuntan publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan. Dalam laporan tersebut disebutkan kalau laporan keuangan konsolidasi menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasi PT Garuda Indonesia Tbk dan entitas anak 31 Desember 2018. Dalam kasus ini, Seharusnya tugas seorang auditor adalah menilai besarnya kesalahan saji materialitas yang terkandung dalam laporan keuangan dan memberikan solusi bagi pemilik perusahaan yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang benar-benar mempunyai kualifikasi sebagai seorang auditor.

Kasus berikutnya yaitu, PT. Hanson International Tbk (MYRX), dalam hal ini Benny Tjokrosaputro, Adnan Tabrani dan akuntan Sherly Jokom. Sanksi diberikan setelah OJK merampungkan hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Hanson International. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK Djustini Septiana mengatakan, Benny Tjokrosaputro selaku direktur utama Hanson International terbukti melakukan pelanggaran Pasal 107 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) dan bertanggung jawab atas kesalahan penyajian Laporan Keuangan Tahunan (LKT) Hanson International per 31 Desember 2016. Kesalahan ini mengakibatkan LKT pada periode tersebut mengalami overstated dengan nilai material sejumlah Rp 613 miliar. OJK memutuskan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 500 juta kepada Hanson International. Kemudian, secara individu kepada Benny, OJK menjatuhkan denda sebesar Rp 5 miliar. Selain Benny, Direktur Hanson International Adnan Tabrani juga didenda sebesar Rp 100 juta karena bertanggung jawab atas LKT tahun 2016. Kemudian,

Sherly Jokom selaku rekan KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja, turut disanksi dalam bentuk pembekuan STTD selama satu tahun.

Proses pembuatan laporan keuangan tidak terlepas dari salah saji material maupun tidak material, baik karena adanya kecurangan maupun kekeliruan. Sedangkan perkembangan dunia bisnis saat ini sangat pesat, sehingga para pelaku bisnis dituntut untuk lebih transparan dan dapat dipercaya dalam pengelolaan laporan keuangan. Salah satunya adalah dengan cara mengaudit laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang sifatnya netral dan independen (tidak memihak). Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi hasil audit dan penerbitan laporan audit. Dengan mempertahankan independensi, auditor akan terhindar dari konflik kepentingan dalam melakukan pertimbangan yang objektif untuk menyatakan pendapatnya dalam laporan hasil audit, apakah informasi yang ada dalam laporan keuangan material atau tidak. Dari hasil penelitian terdahulu menurut Utami (2016) menunjukkan bahwa independensi secara parsial berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Tetapi, berdasarkan penelitian Febriyanti (2018) menunjukkan bahwa independensi secara parsial tidak berpengaruh pada penentuan materialitas pada laporan keuangan audit.

Selain independensi seorang auditor juga harus memegang teguh pada etika profesi dalam menjalankan tugasnya. Etika profesi berisi aturan dalam menjalankan profesi yang disebut dengan kode etik. Kode etik ini harus ditaati agar memberikan pelayanan jasa yang memuaskan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan memegang teguh etika profesi, maka keputusan yang akan dihasilkan dalam mempertimbangkan tingkat materialitas akan lebih independen dan objektif. Dari hasil penelitian terdahulu menurut Sofia dan Damayanti (2017) menunjukkan bahwa etika profesi berpengaruh secara parsial terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Tetapi, berdasarkan penelitian Sitepu dan Nainggolan (2018) menunjukkan bahwa etika profesi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat materialitas adalah kualitas audit. Semakin tinggi kualitas audit maka semakin baik pertimbangan tingkat materialitasnya. Seorang auditor dapat mengetahui tingkat mutu atau kualitas auditnya melalui tingkat kepuasan klien dapat tercapai, maka seorang akuntan publik harus mampu meningkatkan kualitas auditnya. Kepuasan yang dirasakan oleh klien akan menimbulkan kepercayaan terhadap kemampuan yang dimiliki oleh akuntan publik. Untuk mencapai mutu dan kualitas yang baik tentunya hal yang dipertimbangkan salah satunya adalah tingkat materialitas. Dari hasil penelitian terdahulu menurut Hariady dan Haryanto (2017) bahwa kualitas audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penentuan tingkat materilitas.

Materialitas adalah dasar penetapan standar auditing tentang standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Oleh karena itu, tingkat materialitas memiliki dampak yang mencakup semua aspek audit pada audit atas laporan keuangan. Materialitas pada laporan keuangan merupakan besarnya keseluruhan salah saji minimum pada suatu laporan keuangan yang cukup krusial sehingga menciptakan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, peneliti akan melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“Pengaruh Independensi, Etika Profesi dan Kualitas Audit terhadap Tingkat Materialitas (Studi pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung).”**

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana independensi, etika profesi, kualitas audit dan tingkat materialitas pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung?
2. Bagaimana independensi, etika profesi dan kualitas audit secara simultan terhadap tingkat materialitas pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung?

3. Bagaimana pengaruh independensi secara parsial terhadap tingkat materialitas pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung?
4. Bagaimana pengaruh etika profesi secara parsial terhadap tingkat materialitas pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung?
5. Bagaimana pengaruh kualitas audit secara parsial terhadap tingkat materialitas pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana independensi, etika profesi, kualitas audit dan tingkat materialitas pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara simultan independensi, etika profesi dan kualitas audit terhadap tingkat materialitas pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial independensi terhadap tingkat materialitas pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial etika profesi terhadap tingkat materialitas pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial kualitas audit terhadap tingkat materialitas pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi pihak akademis, penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai penelitian auditing yang menyangkut dengan hal-hal yang berpengaruh terhadap tingkat materialitas
2. Bagi pihak penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya mengenai hal-hal yang berpengaruh terhadap tingkat materialitas

1.5.2 Aspek Praktis

Bagi Kantor Akuntan Publik bermanfaat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh independensi, etika profesi dan kualitas audit terhadap tingkat materialitas sehingga dapat menjaga tingkat materialitas

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, tahap penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, validitas dan reliabilitas serta teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang karakteristik responden, hasil penelitian serta pembahasan penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari hasil penelitian.